

Judul : 224 daerah belum tersentuh, PKP diminta perluas akses bedah rumah
Tanggal : Sabtu, 06 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

224 Daerah Belum Tersentuh PKP Diminta Perluas Akses Bedah Rumah

IG: PROBAD



Novita wijayanti

ANGGOTA Komisi V DPR Novita Wijayanti mengapresiasi kenaikan kuota penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) program Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP). Kebijakan ini merupakan langkah penting untuk memperluas akses bedah rumah di seluruh daerah.

"Peningkatan kuota tahun ini jadi yang terbesar sepanjang tiga periodenya berada di Komisi V," kata Novita dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025).

Novita melihat keseriusan mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto membangun tiga juta unit rumah serta mengatasi angka rumah tidak layak huni yang mencapai 26,9 juta unit. Selama beberapa kali mengikuti pemilu, program bedah rumah selalu jadi primadona. "Meskipun nilainya tidak besar, program ini sangat membantu masyarakat," ucapnya. Dia berharap, target 400 ribu unit BSPS yang disiapkan Pemerintah mampu menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali. Saat ini dari 518 kabupaten/kota, masih ada 224 daerah yang belum tersentuh BSPS. Termasuk 22 wilayah yang tidak pernah mendapatkan bantuan itu dalam lima tahun terakhir.

"Ini harus jadi perhatian. Pemerataan adalah kunci agar penuntasan rumah tidak layak huni dapat tercapai di semua wilayah," tegas wakil ketua Badan Urusan

Rumah Tangga DPR itu.

Karena itu, dia meminta Pemerintah melakukan pemutakhiran data secara presisi untuk mengetahui kondisi riil rumah tidak layak huni di setiap kabupaten dan desa. Data yang valid jadi dasar penting menghitung waktu penyelesaian target nasional, sekaligus memastikan laporan tahunan benar-benar terukur.

Novita juga mendorong agar kuota BSPS ke depan terus ditingkatkan melalui kolaborasi strategis dengan perusahaan-perusahaan besar lewat program *Corporate Social Responsibility*. "Pelibatan CSR diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah bantuan di atas 400 ribu unit," katanya.

Lebih lanjut, legislator asal Jawa Tengah itu mengusulkan penyederhanaan prosedur pengajuan BSPS agar masyarakat tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit. "Karena, sandang, pangan, pendidikan, dan papan adalah syarat kesejahteraan. Papan (rumah) adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi," katanya.

Senada, anggota Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan pentingnya penguatan program BSPS sebagai upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena, saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah di tidak layak.

Dia menyebut, BSPS bukan hanya membantu rehabilitasi rumah, tapi juga menumbuhkan semangat gotong royong di masyarakat. Besaran bantuan yang berkisar Rp 20 juta per unit terbukti efektif mendorong partisipasi warga. Karena warga turut menyumbang tenaga dan swadaya, sehingga nilai perbaikan rumah jadi jauh lebih besar dari jumlah bantuan.

"Mereka bergerak, ikut berpartisipasi, bahkan muncul gotong-royong di daerah-daerah yang tidak mampu," jelas anggota Fraksi Partai NasDem itu. ■ PYB